

**PENGARUH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI ANALISA INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA KAB/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

NIDA BUDIARTI
2015310301

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

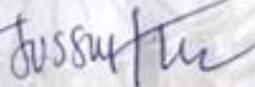
2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nida Budiarti
Tempat,Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Juli 1997
N.I.M : 2015310301
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Sektor Publik
Judul : Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat melalui
Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota
Provinsi Jawa Timur

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 17 September 2019



Dr. Drs. Agus Samekto, Ak., M.Si
NIDN : 0716086302

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 17 September 2019



Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA

Nida Budiarti

2015310301

nida.budiarti97@gmail.com

ABSTRACK

This study aims to obtain information and empirical evidence of the existence of the people's welfare through the analysis of the human development index. The populations of this study are all of regencies/cities of East Java Province in period 2015-2017. The samples is 114 regencies/cities that meet the criteria to be used as research samples. The method used is quantitative method with WrapPls 6.0 version. The result show that the Regional Original Revenue (PAD) and the Balancing Fund have positive effect on Peoples Walfare, while Regional Expenditure does not effect the People's Walfare.

Keyword: *Regional Original Revenue, Balancing Fund, Regional Expenditure, People's Walfare, and Human Development Index.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan istilah sederhana, namun sulit untuk di realisasikan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita cita dari setiap negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat dapat terepenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Hal lain, yang juga masih perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat yang sejahtera tentu menjadi salah satu tujuan hidup, namun kesejahteraan tidak dapat di capai begitu saja. Banyak cara dan pengorbanan yang harus dilewati untuk meraih kesejahteraan yang di idamkan oleh masing-masing individu, misalnya dengan pendidikan yang tinggi, individu tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjaga kesehatan individu tersebut.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral dalam kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan di suatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, dan pembangunan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM mempunyai tiga unsur yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk

meningkatnya IPM. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi infrastruktur dan kebijakan pemerintah. IPM suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah). salah satu aspek yang sangat penting dalam desentralisasi ekonomi adalah desentralisasi fiskal. UU No. 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU tersebut penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Operasi.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Fiskal Federalism

Teori ekonomi publik mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari alokasi, distribusi dan stabilisasi. Musgrave menyatakan terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasi.

Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal (Azwardi dan Abukosim, 2007:4-5), yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer dan pinjaman daerah yang di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Teori Fiskal Federalism menjelaskan tentang penyusunan anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah. Penjelasan adalah penerapan desentralisasi anggaran yang menyebabkan pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat, jadi pemerintah mampu mengetahui informasi tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah akan lebih paham mengetahui tentang sumber daya ekonomi di daerahnya. Dalam pengetahuan pemerintah mengenai informasi yang sedang dibutuhkan masyarakat maka dengan inilah yang bisa digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Tingkat kesejahteraan harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera Poerwadarmita adalah suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur.

Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spritualnya.

Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan, kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang yang pendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka presentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Kesejahteraan bisa diukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kerentanan (*Vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang, hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral dalam kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan disuatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal didalamnya dan pembangunan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia ukuran yang di terapkan oleh *United Nation Development Programmer* (1990) dalam teori indeks pembangunan manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitik beratkan pada peningkatan dasar manusia.pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli, dan pendidikan. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari indeks pembangunan manusia.

Tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal yang penting di perhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Empat hal pokok tersebut membuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus di hapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus di perhatikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Sumber daya fisik, manusia dan lingkungan selalu di perbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indeks pembangunan manusia ditunjukan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatkan kemampuan dasar, maka digunakanlah suatu indikator untuk mengetahui dampak sebagai komponen dasar perhitungan, yaitu angka harapan hidup ketika lahir pencapaian pendidikan dapat diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu daerah menunjukkan sejauh mana suatu negara

atau daerah mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu berupa angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi seluruh yang telah mencapai standart hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang capaian harus di capai untuk mencapai sasaran tersebut.

Indeks Pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

- a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi)
- b) Tingkat pendidikan diukur dengan harapan melek huruf (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
- c) Standart kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Dimana:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

Pratowo (2013), angka indeks pembangunan manusia (IPM) berkisar anatar angka 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. UNDP membagi status pembegara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu

1. $IPM \leq 50$ (Rendah)
2. $50 \leq IPM \leq 80$ (Sedang menengah)
3. $IPM \geq 80$ (Tinggi)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan

demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam pembangunan dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu lokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Hak, wewenang, kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataan belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini menghancurkan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relation system), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah. Sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan

pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan keungan pemerintahan daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan bantuan yang bersifat blok (*block grant*) yang masuk dalam kategori transfer tanpa syarat. Ciri utama dari transfer tanpa syarat ini adalah pemerintah daerah memiliki diskresi penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan atau prioritas daerah. Dana Alokasi Umum juga sering disebut bantuan tak bersyarat karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja.

Dana alokasi khusus dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Dana alokasi khusus di alokasikan kepada daerah tertinggal dalam rangka melanjutkan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur sanitasi, dan infrastruktur.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

(Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sedangkan untuk belanja modal terdiri dari belanja pegawai (selain honorarium atau upah), belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal aset tetap, serta yang terakhir yaitu belanja tidak terduga. Penelitian ini berfokus belanja modal.

UU Nomor 71 tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Kementerian keuangan Republik Direktorat jendral anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset linya yang di tetapkan oleh pemerintah.

Aset tetap yang dimiliki daerah adalah sebagai akibat dari belanja modal yang merupakan suatu syarat utama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakanya pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam

jangka panjang secara finansial. Belanja modal yang termaksud dalam aset tetap pemerintah daerah ialah seperti peralatan, infrastruktur, bangunan, dan harta tetap lainnya.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Meningkatnya pendapatan asli daerah diasumsikan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penelitian ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

H₁ : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERPENGARUH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan dialokasikan untuk membantu daerah untuk kebutuhan fiskal sarana prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jika dana perimbangan semakin naik maka pengeluaran pemerintah untuk mengalokasikan daerah

tersebut semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik karena insfrasturktur yang ada di daerah tersebut semakin bagus seperti perbaikan jalan di desa-desa.

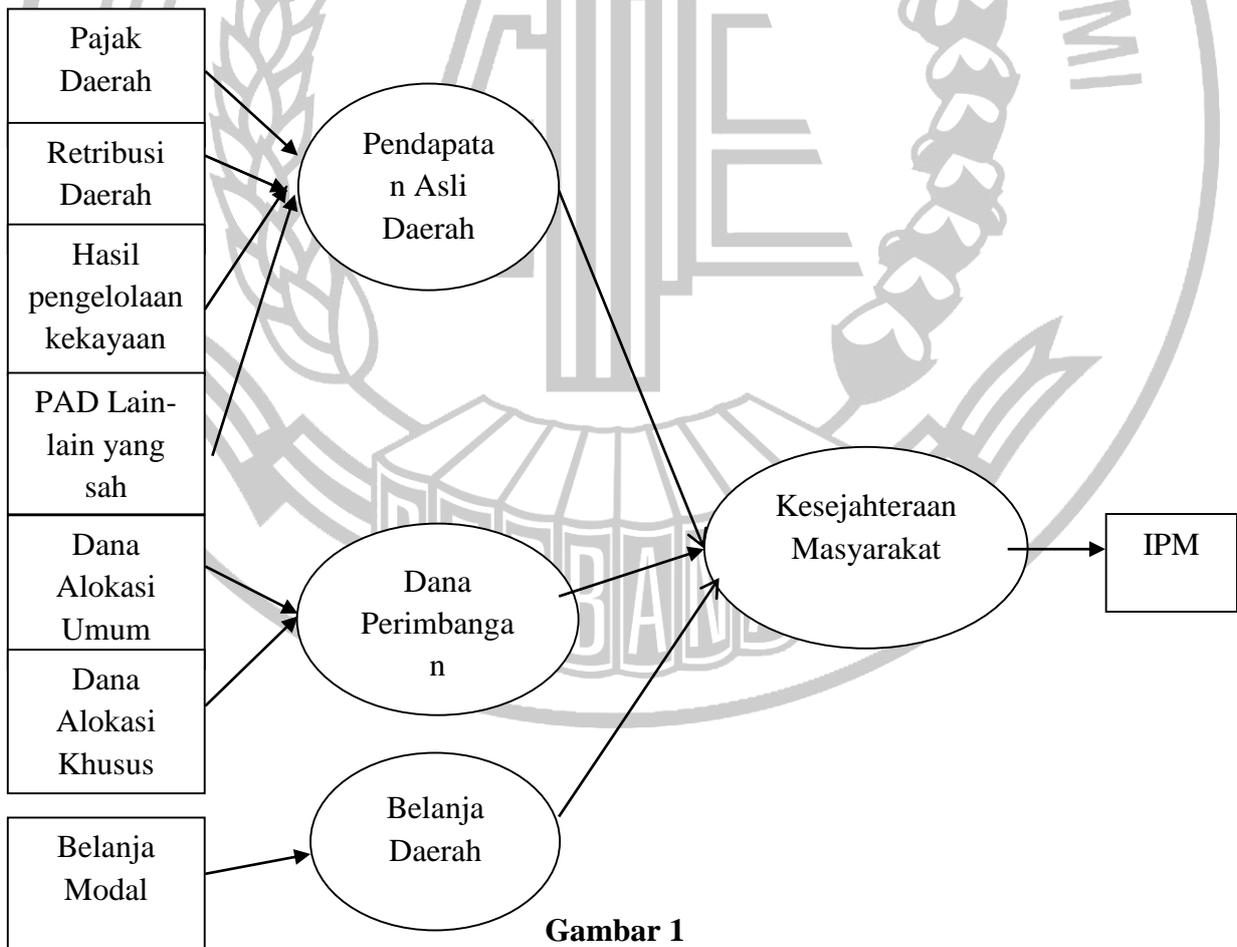
H₁ : DANA PERIMBANGAN BERPENGARUH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pengaruh Belanja Operasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Ida ayu (2016) menyatakan untuk meningkatkan kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah diperlukan pengalokasian dan belanja modal yang

lebih besar berupa pembenahan bangunan dan insfrastruktur yang memadai. peningkatan insfrastruktur publik dan penanaman modal pemerintah seperti pembenahan segala penunjang, pendidikan, kesehatan dan prasana lain sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sektor publik secara berkeseinambungan. Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adanya peningkatan sarana prasana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Belanja modal memiliki peran yang penting terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₁ : BELANJA OPERASI BERPENGARUH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKA



Gambar 1

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 114 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel adalah menerbitkan laporan keuangan Kab/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Berdasarkan kriteria diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 114 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

Data Penelitian

Penelitian ini tergolong menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode arsip. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat yang di proksikan sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan belanja Operasi.

Definisi Operasional Variabel

Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997). HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang

atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Rumus yang digunakan untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia ialah:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 = Indeks Harapan Hidup

X_2 = Indeks Pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (Indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 = Indeks standart hidup layak

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pertauran peraturan perundang-undangan guna kepentingan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatannya (BPS, 2015:15). Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang standart Akuntansi pengelolaan kekayaan disebut bahwa PAD bersumber dari, pertama pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan terakhir PAD yang sah.

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan Kekayaan Daerah} + \text{Lain-lain Pendapatan Sah}$$

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana pembangunan daerah di indonesia

mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan keungan pemerintahan daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Dana Perimbangan = DAU + DAK

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. belanja modal terdiri dari belanja pegawai (selain honorarium atau upah), belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal aset tetap, serta yang terakhir yaitu belanja tidak terduga (Nordian et al, 2014).

ALAT ANALISI

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *Wrap Partia least square* 6.0 (PLS), yaitu yaitu metode analisis yang *powerfull* karena tidak menuntut banyak permintaan seperti skala pengukuran tertentu, jumlah sampel yang besar atau data harus memenuhi asumsi distribusi tertentu (Latan & Ghozali, 2013:03). Alasan peneliti menggunakan *software* WarpPLS 6.0 dalam penelitian ini karena dianggap lebih *powerfull* digunakan untuk menganalisis data pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian perilaku. Analisis WarpPLS terdiri dari dua sub model yaitu sering disebut dengan *outer model* dan *inner model*.

Outer model dapat menunjukkan bagaimana variabel manifest dapat mempresentasikan variabel laten untuk diukur. Sedangkan, *inner model* menunjukkan kemampuan dalam mengestimasi antar variabel laten atau konstruk (Latan dan Ghozali, 2013:10). Pendekatan PLS dikembangkan pertama kali oleh ahli ekonomi dan statistika Herman Ole Andreas World pada 1996. Berikut langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjabarkan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan pada model penelitian yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dimaksudkan untuk dapat menjelaskan alur mengenai distribusi dan perilaku data sampel (Ghozali, 2011)

Tabel 1

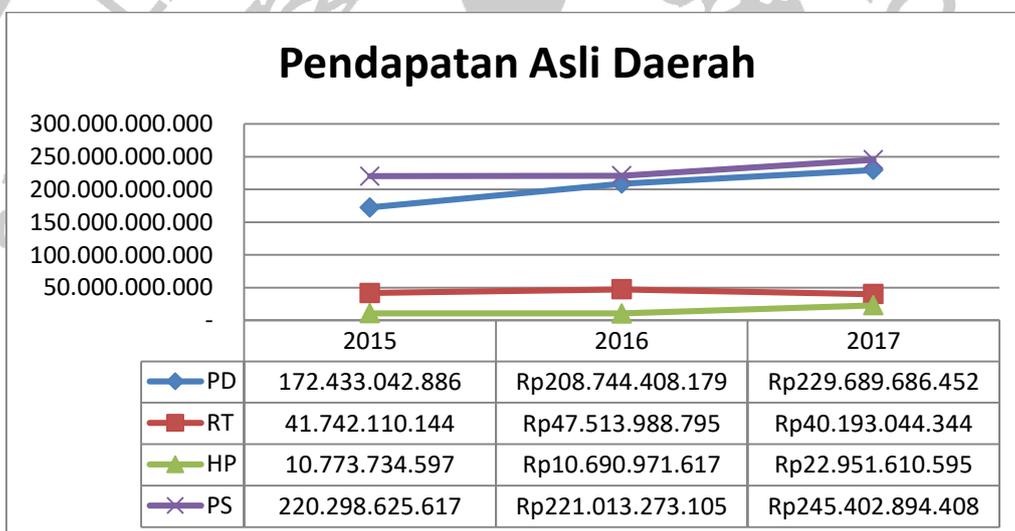
Analisis Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Minimum	Maksimum	Mean	Stdev
2015	58,18	80,05	68,90	5,28
2016	59,09	80,46	70	5,49
2017	59,9	81,07	70,57	5,41

Sumber: data diolah

Tabel 2

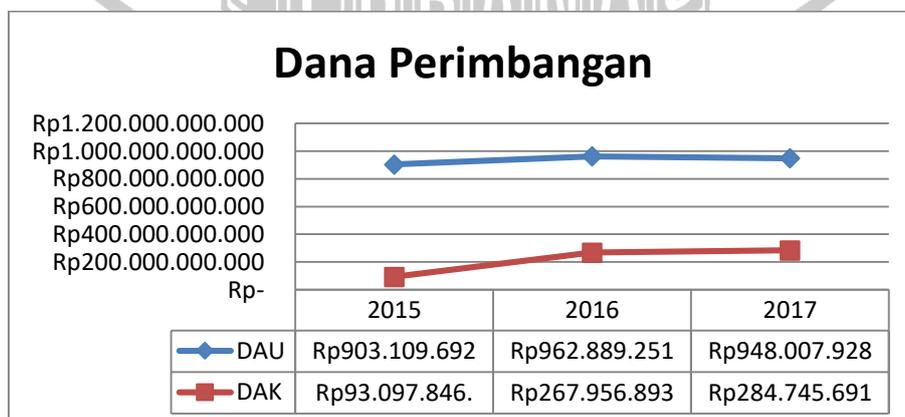
Analisis Nilai Rata-rata Pendapatan Asli Daerah



Sumber: data diolah

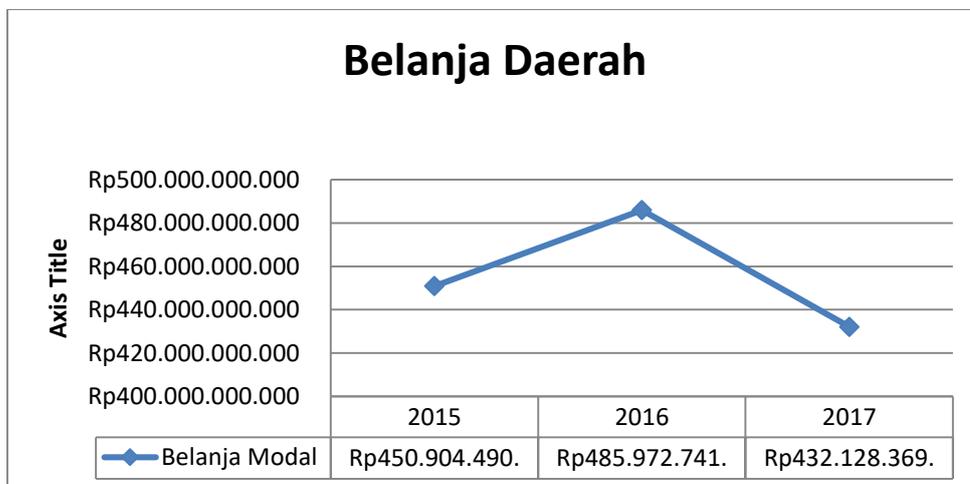
Tabel 3

Analisis Rata-rata Dana Perimbangan



Tabel 4

Analisa Deskriptif Belanja Daerah



Sumber: Data diolah,

Kesejahteraan Masyarakat

kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Grafik kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015 sebesar 68,90 kemudian pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan kenaikan nilai sebesar 70 dan juga tahun 2017 mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 70,57.

Kesimpulan bahwa kenaikan nilai rata-rata kesejahteraan masyarakat yang menggunakan proksi indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia maka semakin sejahtera masyarakat yang berada di wilayah kab/kota provinsi jawa timur. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai ipm maka semakin tidak sejahtera kab/kota di provinsi kesejahteraan masyarakat. UNDP menyatakan bahwa nilai IPM yang >80 maka ipm tersebut tinggi yang artinya Kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur baik.

Pendapatan Asli Daerah

pendapatan asli daerah dari kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Grafik Pajak Daerah (PD) selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Grafik Retribusi daerah (RT) tahun 2016 ke 2017 mengalami sedikit penurunan pada tahun tersebut. Nilai hasil pengelolaan kekayaan pedapatan mengalami kenaikan dari tiap tahunnya. Grafik lain-lain pendapatan sah pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10.690.971.273,10 tetapi tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup banyak sebesar 245.402.849,40. Hasil lain-lain pendapata sah juga mengalami penurunan tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017. Pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur termasuk 3 terbesar dari seluruh indonesia yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah tertinggi. Meningkatnya pendapatan asli daerah diasumsikan dapat meningkatkan pembangunan di daerah sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, jika pendapatan asli daerah selalu menurun maka kesejahteraan masyarakat juga semakin menurun.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang di prokasikan dengan menggunakan DAU dan DAK di kab/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Grafik DAU dan DAK pada tahun 2015-2017 selalu mengalami kenaikan. Dana Perimbangan diharapkan

membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas. Semakin meningkat bantuan pemerintah dalam dana perimbangan maka kesejahteraan masyarakat semakin baik, karena bantuan tersebut untuk pembangun dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin meningkat dana perimbangan semakin baik kesejahteraan masyarakat karena perbaikan jalan, pelayanan masyarakat semakin baik, tetapi jika semakin rendah dana perimbangan maka kesejahteraan

masyarakat semakin menurun dikarenakan perbaikan jalan, pelayanan masyarakat kurang baik.

Belanja Daerah

Kab/Kota Jawa Timur dari belanja daerah yang di proksikan dengan menggunakan belanja modal tahun 2015 ketahun 2016 mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 432.128.369

Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity

Tabel 5

Nilai Loading Factor Konstruk Kesejahteraan masyarakat

No	Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	P-value	Keterangan
1.	IPM	1,000	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Hasil WrapPls 6.0

Tabel 6

Nilai Loading Factor Konstruk Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	P-Value	Keterangan
1	PD	0,936	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
2	RD	0,907	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
3	HP	0,624	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
4	PS	0,494	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Hasil WrapPls 6.0

Tabel 7

Nilai Loading Factor Konstruk Dana Perimbangan

No	Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	P- <i>Value</i>	Keterangan
1	DAU	0,901	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
2	DAK	0,901	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Hasil WarpPls 6.0

Tabel 8

Nilai Loading Factor Konstruk Belanja Daerah

No	Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	P- <i>Value</i>	Keterangan
1	BM	1,000	<0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber : Hasil WarpPls 6.0

Hasil keseluruhan diatas menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat *convergent validity* penelitian ini, untuk mengukur *convergent validity* dapat dilakukan dengan melihat hasil dari WarpPLS 6.0 pada bagian Average Variance Extracted (AVE). Pengukuran AVE tersebut, digambarkan oleh variance atau keragaman variabel manifest yang dimiliki *Discriminant Validity*

konstruk laten. Kriteria penilaian dari nilai AVE adalah $AVE > 0,5$. Berdasarkan hasil Warp PLS 6.0 menunjukkan bahwa nilai untuk konstruk Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah berada diatas 0,5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai AVE menunjukkan *convergent validity* yang dapat dikatakan baik.

Tabel 9
Discriminant Validity

	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Kesejahteraan Masyarakat
IPM				
PD	-0,0000	0,0000	0,0000	1,000
RD	0,936	-0,195	0,751	0,177
HP	0,907	0,313	-0,708	0,081
PS	0,624	0,277	-1,385	-0,231
DAU	0,494	0,595	0,228	0,136
DAK	0,014	0,901	-0,228	0,136
BM	0,014	0,901	-0,228	0,136
	0,014	0,901	-0,228	0,136

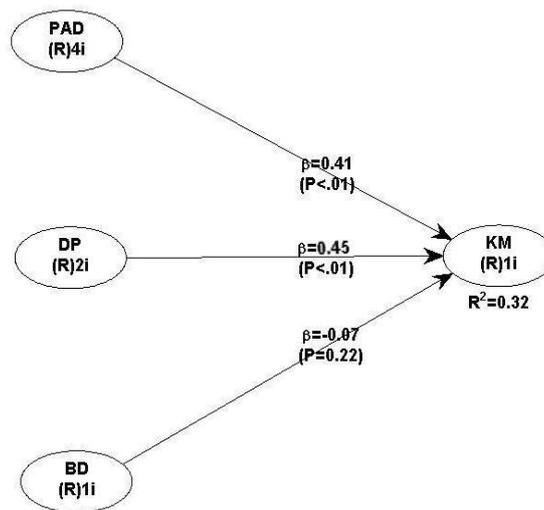
Hasil output pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa korelasi konstruk Kesejahteraan Masyarakat. Konstruk indikatornya lebih besar dari pada korelasi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan konstruk memenuhi kriteria *discriminant validity*, dimana seluruh konstruk laten memprediksi indikator mereka lebih besar dibandingkan dengan indikator lainnya.

Realibilty Validity

Uji realibilitas konstruk yang dapat dukur melalui *composite reliability*. Hasil dari WarpPLS 6.0 menunjukkan bahwa nilai untuk konstruk konsturk Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,840, dan nilai untuk konstruk Dana Perimbangan adalah 0,896. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai *composite reliability* dari konstruk yang dihasilkan lebih dari 0,7. Berdasarkan kriteria *Reliability*, hasil tersebut menunjukkan bahwa *Reliability Validity* dikatakan baik.

Model Sturktur (Inner Model)

Gambar 1



pengujian terhadap model struktural ini dilakukan dengan melihat R-Square yang merupakan uji *goodness fit model*. Hasil tersebut menunjukkan nilai R-Square pada variabel Kesejahteraan Masyarakat yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah sebesar 0,32 artinya bahwa variabel-variabel laten

eksogen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 32% dan model penelitian ini tergolong lemah. Hal ini dinilai dari nilai koefisien determinasi R Square <0,75; <0,45; <0,25 untuk setiap variabel laten endogen dalam model struktural dapat diinterpretasikan sebagai substansial, moderate, lemah.

Tabel 10**P-Values**

Variabel	Kesejahteraan Masyarakat
Pendapatan Asli Daerah	<0,001
Dana Perimbangan	<0,001
Belanja Daerah	0,216

Sumber : Hasil WrapPls

Tabel 11**Path Coefficients**

Variabel	Kesejahteraan Masyarakat
Pendapatan Asli Daerah	0,407
Dana Perimbangan	0,452
Belanja Daerah	-0,072

Sumber: WrapPls

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pajak daerah tahun 2015 sebesar 172.433.042.886 dan tahun 2017 sebesar 229.689.686,45. Retribusi daerah, Pengelolaan kekayaan, lain-lain pendapatan sah mengalami kenaikan dari 2015 sampai tahun 2017.

Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah tersebut maka akan

semakin besar pendapatan Masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah sendiri yang perlu ditingkatkan untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah sangat berguna untuk pembangunan suatu daerah dan dapat mengurangi ketergantungan daerah tersebut.

Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kab/kota provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017, hal ini disebabkan tingginya PAD pada setiap kab/kota memiliki pendapatan yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat baik. Pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur termasuk 3 terbesar dari seluruh Indonesia yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah tertinggi. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) menyatakan bahwa

Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai PAD yang sangat tinggi, Provinsi Bali dan Jawa Timur memiliki nilai PAD yang tinggi setelah DKI Jakarta

Meningkatnya pendapatan asli daerah diasumsikan dapat meningkatkan pembangunan di daerah tersebut sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian ini mengukur nilai dana perimbangan dengan menggunakan DAU dan DAK. Dana perimbangan tahun 2015 mendapatkan 93.097.846,7 dan tahun 2016 meningkat sangat tinggi sebesar 962.956.893 setiap tahun selalu ada perubahan dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 284.745.691 pada kab/kota provinsi Jawa Timur.

Pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi terhadap Dana perimbangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 0,452. Tingkat signifikan menunjukkan hasil $<0,05$ maka hipotesis (H_0) ditolak dan (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai dana perimbangan akan mendorong ekonomi di daerah tersebut maka infrastruktur meningkat, perbaikan jalan pun semakin baik, pelayanan masyarakat terjamin dan mencerminkan kesejahteraan masyarakat karena infrastruktur semakin bagus, maka semakin tinggi dana perimbangan yang di peroleh maka kesejahteraan masyarakat terjamin.

Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal karena keefisien anggaran bisa berjalan dengan baik dan dapat tercapai apabila anggaran pemerintah mampu dijalankan dengan baik

sesuai kebutuhan masyarakat di kab/kota Jawa Timur mampu mengelola dan yang di berikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah di kab/kota provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dan penurunan dari setiap tahunnya. Tahun 2015 sebesar 450.904.490 ditahun 2016 meningkat 485.972.741 tetapi tahun 2017 mengalami penurunan 432.128.369.

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Belanja rutin seperti belanja pegawai dan kurang produktif untuk kesejahteraan masyarakat (Saragih, 2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya di alokasikan untuk hal-hal produktif. Direktur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian keuangan (kemkeu) kurniawibawa menyatakan bahwa sebagian besar anggaran belanja daerah lebih banyak dipakai untuk belanja operasional, seperti belanja pegawai.

Pemerintah menganggarkan belanja modal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami penurunan sebesar 6%. Penurunan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya pendelegasian anggaran belanja modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang termasuk dalam dana transfer ke daerah, tak hanya itu penurunan anggaran belanja modal tersebut juga disebabkan

oleh adanya pendelegasian anggaran belanja modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang termasuk dalam dana transfer kedaerah. Meskipun anggaran belanja menurun tetapi belanja infrastruktur meningkat setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kab/kota prov jawa timur periode 2015-2018. Kesejahteraan Masyarakat pada penelitian ini diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Pendapatan Asli daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan dana perimbangan menggunakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diakses melalui djpk. Subjek penelitian ini menggunakan Kab/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kelemahan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian yaitu (1) Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan kab/kota Provinsi Jawa Timur. (2) Hasil penelitian ini memiliki nilai $p\text{-value} > 0,05$ sehingga variabel independen dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat Kab/Kota Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian disimpulkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mengembangkan peneliti selanjutnya ialah sebagai berikut (1) Peneliti selanjutnya di harapkan untuk menambah sampel atau

tahun agar penelitian diperoleh semakin meningkat generalisasinya. (2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti variabel independen yang akan digunakan agar pengaruh yang di dapat lebih berpengaruh besar terhadap variabel variabel dependen.

DAFTAR RUJUKAN

- Azwardi dan Abukosim. 2007. Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 5, Nomor 2, Desember 2007.
- Badan Pusat Statistik 2015-2017. Indeks Pembangunan Manusia BPS : Jawa Timur
- Decentralization Support Facility. 2010. Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah.
- Gede, W., & I Gusti, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3).
- Hastu, S., & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1).
- Hopkins, M. (1991). Human development revisited: A new UNDP report. *World Development*, 19(10)
- I Putu, W., & Dwirandra. (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU,

- DAK, dan SiLPA. *E-Jurnal Akuntansi*, 12(3). 07/2013 tentang pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus
- Ida Ayu, S., & Ni Luh, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3).
- Putu Gde, P., & I Gusti, U. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 11(3).
- Laten & Ghozali. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (7th Edition ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Riva, H. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1).
- Mudrika, H., & Muhammad, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Akuntansi dan Ekonomi*, 5(2).
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pieter, N. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Akuntansi dan Ekonomi*, 2(2).
- Usnida, U. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 10(2).
- Zul, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah*, 10(2).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK